

ABSTRAK

Dalam proses kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya memerlukan dukungan fisik dari *stakeholder* tetapi juga dukungan interaksi antar *stakeholder* yang terkait, yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi interaksi antar *stakeholder* dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusi di Kabupaten Sidoarjo dari perspektif *governance* dengan aspek komunikasi dan kerjasama antar *stakeholder*

Metode pendekatan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo untuk melihat penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan Informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan pengetahuan informan tentang penerapan kebijakan pendidikan inklusif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Stakeholder* yang terlibat dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo dari perpektif *governance* didalam kerangka penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Kabupaten Sidoarjo terdapat tiga *stakeholder* yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (Dinas Pendidikan, kepala sekolah, GPK, guru kelas), *private sector* (dokter dan psikolog/trapis) dan *society* (komite, orangtua dan peserta didik). Komunikasi sebagai unsur yang membentuk interaksi antar *stakeholder* belum terlaksana dengan baik. Sedangkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan, telah bekerjasama dengan pihak dokter maupun psikologi dari rumah sakit untuk melakukan identifikasi awal hambatan apa yang dialami calon peserta didik, tetapi kerjasama dalam penyediaan GPK yang memiliki latar belakang pendidikan yang khusus dalam menangani anak berkebutuhan khusus disetiap sekolah belum sepenuhnya terlaksana karena kurangnya kerjasama antar *stakeholder* seperti pihak sekolah dan orangtua.

Kata kunci : Kebijakan Pendidikan, Interaksi *Stakeholder*, *Governance*